



## **GUBERNUR SUMATERA UTARA**

---

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 23 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE – SUMATERA UTARA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu diatur alokasi pembagian hasil penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB/BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Air Permukaan (PAP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 1103 );
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun

- 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 59 );
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
  9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun

2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5);

11. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 60);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA UTARA.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.
5. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
6. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBN-KB adalah Pajak yang dipungut atas setiap penyerahan Kendaraan Bermotor.

#### **Pasal 4**

Tata cara penganggaran dan pertanggungjawaban pembagian bagi hasil penerimaan PKB, BBN-KB, PBBKB dan PAP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 5**

Penyaluran dan Pendistribusian Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan oleh Biro Keuangan Setdaprovsu.

### **BAB IV**

#### **ALOKASI PEMBAGIAN BAGI HASIL PAJAK**

#### **Pasal 6**

- (1) Alokasi Bagi Hasil Penerimaan PKB dan BBN-KB ditetapkan sebagai berikut:
  - a. 30 % ( tiga puluh persen ) dari realisasi penerimaan dalam 1 ( satu ) tahun anggaran diberikan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota ;
  - b. Pembagian hasil penerimaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan sebagai berikut :
    1. 70 % (tujuh puluh persen) dialokasikan berdasarkan aspek potensi yakni realisasi penerimaan pada masing-masing Pemerintah Kabupaten / Kota.
    2. 30 % (tiga puluh persen) dialokasikan kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan aspek pemerataan dengan memperhatikan Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Jumlah Desa / Kelurahan dan Panjang Jalan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Alokasi Pembagian Bagi Hasil Penerimaan PBBKB ditetapkan sebagai berikut :
  - a. 70 % (tujuh puluh persen ) dari realisasi penerimaan dalam 1 ( satu ) tahun anggaran diberikan kepada Pemeritah Kabupaten/Kota;
  - b. Pembagian hasil penerimaan PBBKB sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan sebagai berikut :

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Pada saat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pedoman Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 10**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 28 Mei 2012

**Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

**dto**

**GATOT PUJO NUGROHO**

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 30 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

  
NURDIN LUBIS

## DAFTAR PERHITUNGAN BAGI HASIL ALOKASI PKB / BBN-KE (ASPEK PEMERATAAN) UNTUK KABUPATEN / KOTA SE-SUMATERA UTARA

NO	KAB / KOTA	ASPEK PEMERATAAN									
		JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	RATIO (%)	LUAS WILAYAH (Km <sup>2</sup> )	RATIO (%)	JUMLAH (DESA/KEL)	RATIO (%)	PANJANG JALAN (Km <sup>2</sup> )	RATIO (%)	JML. RATIO (%)	RATIO RATA-RATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	MEDAN	2.102.105,00	15,99	265,10	0,39	151,00	2,61	3.035,410	8,33	27,32	6,83
2	DELI SERDANG	1.738.431,00	13,23	2.486,14	3,67	394,00	6,81	3.364,244	9,23	32,94	8,24
3	SERDANG BEDAGAI	630.728,00	4,80	1.913,33	2,83	243,00	4,20	1.536,470	4,21	16,04	4,01
4	TEBING TINGGI	141.059,00	1,07	38,44	0,06	35,00	0,61	216,240	0,59	2,33	0,58
5	BINJAI	252.652,00	1,92	90,24	0,13	37,00	0,64	348,188	0,96	3,65	0,91
6	LANGKAT	1.042.523,00	7,93	2.263,29	3,34	260,00	4,50	1.745,380	4,79	20,56	5,14
7	SIMALUNGUN	853.112,00	6,49	4.386,60	6,48	350,00	6,05	2.291,230	6,29	25,31	6,33
8	PEMATANG SIANTAR	238.773,00	1,82	79,97	0,12	43,00	0,74	323,410	0,89	3,57	0,89
9	TANJUNG BALAI	163.679,00	1,25	61,52	0,09	31,00	0,54	310,900	0,85	2,73	0,68
10	ASAHAN	688.529,00	5,24	3.675,79	5,43	173,00	3,04	1.575,680	4,32	18,03	4,51
11	BATU BARA	382.474,00	2,91	904,96	1,34	100,00	1,73	426,800	1,17	7,15	1,79
12	LABUHAN BATU	430.103,00	3,27	2.056,20	3,04	93,00	1,69	965,300	2,65	10,65	2,66
13	LABUHAN BATU UTARA	337.059,00	2,56	3.570,98	5,27	90,00	1,56	945,650	2,59	11,99	3,00
14	LABUHAN BATU SELATAN	260.802,00	1,98	3.596,20	5,31	54,00	0,93	645,790	1,77	10,00	2,50
15	KARO	360.880,00	2,75	2.127,25	3,14	262,00	4,53	1.322,570	3,63	14,05	3,51
16	DAIRI	271.983,00	2,07	1.927,80	2,85	169,00	2,92	1.477,970	4,05	11,89	2,97
17	PAK PAK BHARAT	41.062,00	0,31	1.218,30	1,80	52,00	0,90	491,200	1,35	4,36	1,09
18	SIBOLGA	94.614,00	0,72	10,77	0,02	17,00	0,29	63,472	0,17	1,20	0,30
19	TAPANULI TENGAH	314.632,00	2,39	2.158,00	3,19	173,00	3,04	952,720	2,61	11,24	2,81
20	TAPANULI UTARA	367.595,00	2,80	3.764,65	5,56	243,00	4,20	1.704,190	4,68	17,23	4,31
21	TOBA SAMOSIR	171.833,00	1,31	2.352,35	3,47	213,00	3,73	1.723,550	4,73	13,24	3,31
22	HUMBANG HASUNDUTAN	155.290,00	1,18	2.297,20	3,39	144,00	2,49	1.115,780	3,06	10,13	2,53
23	SAMOSIR	131.549,00	1,00	2.433,50	3,59	117,00	2,02	751,330	2,06	8,68	2,17
24	TAPANULI SELATAN	263.812,00	2,01	4.352,86	6,43	503,00	8,70	2.002,060	5,49	22,63	5,66
25	PADANG LAWAS	185.209,00	1,41	3.892,74	5,75	304,00	5,26	650,000	1,78	14,20	3,55
26	PADANG LAWAS UTARA	193.278,00	1,47	3.918,05	5,79	383,00	6,71	1.339,000	3,67	17,64	4,41
27	MANDAILING NATAL	423.712,00	3,22	6.620,70	9,78	395,00	6,83	1.999,380	5,48	25,32	6,33
28	PADANG SIDEMPUAN	188.499,00	1,43	114,65	0,17	79,00	1,37	431,520	1,18	4,15	1,04
29	NIAS	113.216,00	0,86	1.538,09	2,27	119,00	2,06	641,460	1,76	6,95	1,74
30	GUNUNG SITOLI	118.392,00	0,90	280,78	0,41	101,00	1,75	740,350	2,03	5,09	1,27
31	NIAS BARAT	84.181,00	0,64	473,74	0,70	110,00	1,90	453,800	1,24	4,49	1,12
32	NIAS UTARA	127.703,00	0,97	1.202,78	1,78	113,00	1,95	730,230	2,00	6,71	1,68
33	NIAS SELATAN	272.848,00	2,08	1.625,91	2,40	214,00	3,70	131,900	0,36	8,54	2,13
	JUMLAH	13.142.317,00	100,00	67.698,88	100,00	5.784,00	100,00	36.453,17	100,00	400,00	100,00

Pit. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

## DAFTAR PERHITUNGAN BAGI HASIL ALOKASI PBBKB (ASPEK PEMERATAAN) UNTUK KABUPATEN / KOTA SE-SUMATERA UTARA

NO	KAB / KOTA	ASPEK PEMERATAAN							
		JUMLAH KENDARAAN (UNIT)	RATIO (%)	JUMLAH SPBU (UNIT)	RATIO (%)	PANJANG JALAN (Km <sup>2</sup> )	RATIO (%)	JML. RATIO (%)	RATIO RATA-RATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MEDAN	901.620,00	40,32	88,00	28,48	3.035,410	8,33	77,12	25,71
2	DELI SERDANG	173.601,00	7,76	43,00	13,92	3.364,244	9,23	30,91	10,30
3	SERDANG BEDAGAI	74.049,00	3,31	11,00	3,56	1.536,470	4,21	11,09	3,70
4	TEBING TINGGI	35.580,00	1,59	9,00	2,91	216,240	0,59	5,10	1,70
5	BINJAI	54.613,00	2,44	7,00	2,27	348,188	0,96	5,66	1,89
6	LANGKAT	122.031,00	5,46	11,00	3,56	1.745,380	4,79	13,80	4,60
7	SIMALUNGUN	117.405,00	5,25	12,00	3,88	2.291,230	6,29	15,42	5,14
8	PEMATANG SIANTAR	65.599,00	2,93	9,00	2,91	323,410	0,89	6,73	2,24
9	TANJUNG BALAI	26.205,00	1,17	6,00	1,94	310,900	0,85	3,97	1,32
10	ASAHAN	129.599,00	5,80	13,00	4,21	1.575,680	4,32	14,32	4,77
11	BATU BARA	34.704,00	1,55	10,00	3,24	426,800	1,17	5,96	1,99
12	LABUHAN BATU	111.191,00	4,97	9,00	2,91	965,300	2,65	10,53	3,51
13	LABUHAN BATU UTARA	23.437,00	1,05	6,00	1,94	945,650	2,59	5,58	1,86
14	LABUHAN BATU SELATAN	39.685,00	1,77	9,00	2,91	645,790	1,77	6,46	2,15
15	KARO	28.789,00	1,29	11,00	3,56	1.322,570	3,63	8,48	2,83
16	DAIRI	15.268,00	0,68	5,00	1,62	1.477,970	4,05	6,36	2,12
17	PAK PAK BHARAT	8.539,00	0,38	-	-	491,200	1,35	1,73	0,58
18	SIBOLGA	15.169,00	0,68	3,00	0,97	63,472	0,17	1,82	0,61
19	TAPANULI TENGAH	28.569,00	1,28	3,00	0,97	952,720	2,61	4,86	1,62
20	TAPANULI UTARA	14.804,00	0,66	4,00	1,29	1.704,190	4,68	6,63	2,21
21	TOBA SAMOSIR	12.300,00	0,55	5,00	1,62	1.723,550	4,73	6,90	2,30
22	HUMBANG HASUNDUTAN	8.995,00	0,40	1,00	0,32	1.115,780	3,06	3,79	1,26
23	SAMOSIR	6.663,00	0,30	1,00	0,32	751,330	2,06	2,68	0,89
24	TAPANULI SELATAN	44.724,00	2,00	6,00	1,94	2.002,060	5,49	9,43	3,14
25	PADANG LAWAS	13.362,00	0,60	6,00	1,94	650,000	1,78	4,32	1,44
26	PADANG LAWAS UTARA	8.536,00	0,38	4,00	1,29	1.339,000	3,67	5,35	1,78
27	MANDAILING NATAL	28.907,00	1,29	6,00	1,94	1.999,380	5,48	8,72	2,91
28	PADANG SIDEMPUAN	44.551,00	1,99	4,00	1,29	431,520	1,18	4,47	1,49
29	NIAS	15.122,00	0,68	-	-	641,460	1,76	2,44	0,81
30	GUNUNG SITOLI	12.610,00	0,56	4,00	1,29	740,350	2,03	3,89	1,30
31	NIAS BARAT	3.297,00	0,15	-	-	453,800	1,24	1,39	0,46
32	NIAS UTARA	5.296,00	0,24	1,00	0,32	730,230	2,00	2,56	0,85
33	NIAS SELATAN	11.434,00	0,51	2,00	0,65	131,900	0,36	1,52	0,51
	JUMLAH	2.236.254,00	100,00	309,00	100,00	36.453,17	100,00	300,00	100,00

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

## DAFTAR PERHITUNGAN PEMBAGIAN ALOKASI PAJAK AIR PERMUKAAN ( ASPEK PEMERATAAN ) UNTUK KABUPATEN / KOTA SE-SUMATERA UTARA

NO	KAB / KOTA	ASPEK PEMERATAAN							
		JUMLAH PENDUDUK ( JIWA )	RATIO ( % )	LUAS WILAYAH ( Km <sup>2</sup> )	RATIO ( % )	JUMLAH ( DESA/KEL )	RATIO ( % )	JML. RATIO ( % )	RATIO RATA-RATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MEDAN	2.102.105,00	15,99	265,10	0,39	151,00	2,61	19,00	6,33
2	DELI SERDANG	1.738.431,00	13,23	2.486,14	3,67	394,00	6,81	23,71	7,90
3	SERDANG BEDAGAI	630.728,00	4,80	1.913,33	2,83	243,00	4,20	11,83	3,94
4	TEBING TINGGI	141.059,00	1,07	38,44	0,06	35,00	0,61	1,74	0,58
5	BINJAI	252.652,00	1,92	90,24	0,13	37,00	0,64	2,70	0,90
6	LANGKAT	1.042.523,00	7,93	2.263,29	3,34	260,00	4,50	15,77	5,26
7	SIMALUNGUN	853.112,00	6,49	4.386,60	6,48	350,00	6,05	19,02	6,34
8	PEMATANG SIANTAR	238.773,00	1,82	79,97	0,12	43,00	0,74	2,68	0,89
9	TANJUNG BALAI	163.679,00	1,25	61,52	0,09	31,00	0,54	1,87	0,62
10	ASAHAN	688.529,00	5,24	3.675,79	5,43	176,00	3,04	13,71	4,57
11	BATU BARA	382.474,00	2,91	904,96	1,34	100,00	1,73	5,98	1,99
12	LABUHAN BATU	430.103,00	3,27	2.056,20	3,04	98,00	1,69	8,00	2,67
13	LABUHAN BATU UTARA	337.059,00	2,56	3.570,98	5,27	90,00	1,56	9,40	3,13
14	LABUHAN BATU SELATAN	260.802,00	1,98	3.596,20	5,31	54,00	0,93	8,23	2,74
15	KARO	360.880,00	2,75	2.127,25	3,14	262,00	4,53	10,42	3,47
16	DAIRI	271.983,00	2,07	1.927,80	2,85	169,00	2,92	7,84	2,61
17	PAK PAK BHARAT	41.062,00	0,31	1.218,30	1,80	52,00	0,90	3,01	1,00
18	SIBOLGA	94.614,00	0,72	10,77	0,02	17,00	0,29	1,03	0,34
19	TAPANULI TENGAH	314.632,00	2,39	2.158,00	3,19	176,00	3,04	8,62	2,87
20	TAPANULI UTARA	367.595,00	2,80	3.764,65	5,56	243,00	4,20	12,56	4,19
21	TOBA SAMOSIR	171.833,00	1,31	2.352,35	3,47	216,00	3,73	8,52	2,84
22	HUMBANG HASUNDUTAN	155.290,00	1,18	2.297,20	3,39	144,00	2,49	7,06	2,35
23	SAMOSIR	131.549,00	1,00	2.433,50	3,59	117,00	2,02	6,62	2,21
24	TAPANULI SELATAN	263.812,00	2,01	4.352,86	6,43	503,00	8,70	17,13	5,71
25	PADANG LAWAS	185.209,00	1,41	3.892,74	5,75	304,00	5,26	12,42	4,14
26	PADANG LAWAS UTARA	193.278,00	1,47	3.918,05	5,79	388,00	6,71	13,97	4,66
27	MANDAILING NATAL	423.712,00	3,22	6.620,70	9,78	395,00	6,83	19,83	6,61
28	PADANG SIDEMPUAN	188.499,00	1,43	114,65	0,17	79,00	1,37	2,97	0,99
29	NIAS	113.216,00	0,86	1.538,09	2,27	119,00	2,06	5,19	1,73
30	GUNUNG SITOLI	118.392,00	0,90	280,78	0,41	101,00	1,75	3,06	1,02
31	NIAS BARAT	84.181,00	0,64	473,74	0,70	110,00	1,90	3,24	1,08
32	NIAS UTARA	127.703,00	0,97	1.202,78	1,78	113,00	1,95	4,70	1,57
33	NIAS SELATAN	272.848,00	2,08	1.625,91	2,40	214,00	3,70	8,18	2,73
	JUMLAH	13.142.317,00	100,00	67.698,88	100,00	5.784,00	100,00	300,00	100,00

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO